



Beban Administrasi Di Disporapar Provinsi Jawa Tengah

Putri Diah Ayu Anggraini,¹⁾ Nisrina Sulistyia Anggraeni²⁾

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Gedung K, Gunungpati, Semarang

10Putridiyah03@students.unnes.ac.id¹⁾
nisrinaang@stud2ents.unnes.ac.id²⁾

ABSTRAK

Beban administrasi merupakan sebuah kategori beban yang berkaitan erat dengan aspek non produksi dan penjualan seperti biaya gaji karyawan, biaya telepon, pengeluaran yang dikeluarkan untuk listrik, air, gas dan juga elemen-elemen serupa, hal tersebut sering dikatakan sebagai beban umum atau beban administrasi. Penulisan artikel ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan fakta dan pendekatan analisis dan sintesis. Hasil dari pembahasan artikel menjelaskan tentang pengelolaan beban administrasi di DISPORAPAR Jawa Tengah yang terdiri dari pengelolaan dokumen dan berkas administratif mulai dari pengaturan surat masuk dan keluar hingga pengarsipan, lalu sistem pelaporan administratif mengenai pentingnya pelaporan sebagai data yang digunakan untuk evaluasi, dan pengelolaan anggaran dan sumber daya yang terkait dengan tugas administratif yang mengatur dana masuk dan keluar serta manajemen sumber daya. Dalam keberjalanannya hambatan yang dihadapi oleh DISPORAPAR Jateng yaitu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi, Dimana hal ini bisa mengganggu efisiensi penyelenggaraan pemerintah, serta aturan atau regulasi yang rumit, lebih sulit dikelola dan membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikannya.

Kata Kunci: Beban, administrasi. DISPORAPAR Jateng

ABSTRACT

Administrative expenses are a category of expenses that are closely related to non-production and sales aspects such as employee salary costs, telephone costs, expenses incurred for electricity, water, gas and also similar elements, it is often said to be general expenses or administrative expenses. The writing of this article uses normative legal research methods with a fact approach and an analysis and synthesis approach. The results of the article discussion explain the management of administrative burdens in DISPORAPAR Central Java which consists of managing administrative documents and files starting from the arrangement of incoming and outgoing mail to archiving, then the administrative reporting system regarding the importance of oppression as data used for evaluation, and budget and resource management related to administrative tasks that regulate incoming and outgoing funds and resource management. In its run, the obstacles faced by DISPORAPAR Central Java are human resources and information technology constraints, which can interfere with the efficiency of government administration, as well as complicated rules or regulations, more difficult to manage and take a long time to adjust.

Keywords: Load, administration. DISPORAPAR Central Java

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan guna memenuhi kebutuhan pelayanan setiap individu atau masyarakat menurut peraturan perundang-undangannya. Pelayanan publik mencakup berbagai aspek seperti pelayanan pengelolaan kependudukan, pelayanan pengelolaan pertanahan, pelayanan sertifikasi, dan bentuk



pelayanan lain yang disediakan oleh instansi pemerintah. Pelayanan publik juga mencakup interaksi antara penyedia layanan publik dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam konteks ini, peran masyarakat menjadi penting tidak hanya sebagai penerima pelayanan, namun juga sebagai pengawas eksternal yang dapat memberikan pendapat, saran, dan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan publik.¹

Pentingnya pelayanan publik yang berkualitas juga tercermin dalam upaya pemerintah dalam menetapkan standar pelayanan publik yang mana harus dipenuhi oleh penyedia layanan publik. Dalam hal ini, standar pelayanan publik mencakup berbagai elemen, termasuk proses pemberian layanan, penanganan pengaduan, dan tindak lanjut pengaduan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya sekedar pemberian layanan, tetapi juga mencakup aspek pemantauan, peningkatan kualitas, dan tanggung jawab penyedia layanan publik dalam menanggapi komentar dan keluhan masyarakat.²

Maka dari itu, pelayanan publik menjalankan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai dan memastikan akses yang adil terhadap layanan yang disediakan oleh pemerintah. Pemahaman yang mendalam mengenai pelayanan publik serta peran dan tanggung jawab masyarakat dalam konteks ini penting adanya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada hal ini merujuk pada pembahasan beban administratif. Beban administratif mempunyai dampak yang besar terhadap akses terhadap akses dan pelayanan publik. Beban administrasi juga memiliki fungsi untuk memudahkan kontrol sosial dan juga memperkuat kesenjangan. Dalam mengelola admin administrasi dengan baik diperlukan masyarakat dengan sumber daya yang tidak sedikit,³ karena semakin banyak SDM yang ada dalam sebuah perusahaan/instansi maka beban administrasi tidak akan memberikan dampak buruknya.

Dalam konteks pelayanan publik seperti DISPORAPAR Jawa Tengah, beban administratif mempunyai dampak yang signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Beban pengelolaan Disporapar Jawa Tengah mencakup berbagai aspek seperti biaya operasional, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan umum. Biaya operasional meliputi sewa, listrik, air, dan biaya lain yang terkait dengan operasional Disporapar. Manajemen sumber daya manusia mencakup biaya penggajian, tunjangan, dan biaya pelatihan karyawan. Saat ini, administrasi umum meliputi peralatan kantor, telepon, asuransi, dan penyusutan aset.⁴

Pemahaman mendalam mengenai beban administrasi di Disporapar Jawa Tengah sangat penting untuk menjamin efisiensi penggunaan sumber daya, transparansi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat lokal. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata dan Pariwisata Jawa Tengah sebaiknya mengevaluasi beban administrasi yang ada dan mencari cara untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Hal ini dapat dicapai dengan mengurangi biaya, memastikan alokasi sumber

¹ Angga Marzuki. (2020). Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 183-199. doi:<https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.192>.

² Kamaruddin Sellang. (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik: Antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

³ Pamela Herd, Hilary Hoynes, Jamila Michener & Donald Moynihan. (2023). Introduction: Administrative Burden as a Mechanism of Inequality in Policy Implementation. *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences*, 9(5), 1–30. <https://www.jstor.org/stable/48738492>

⁴ *Adminpublik*. (2020, September 18). *Pengertian Administrasi Publik*. [Adminpublik.uma.ac.id](https://adminpublik.uma.ac.id) <https://adminpublik.uma.ac.id/2020/09/18/pengertian-administrasi-publik/>. Accessed 25 November 2023.



daya yang tepat, dan memastikan penggunaan sumber daya manusia secara efisien. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai beban administrasi pada pelayanan publik seperti Disporapar di Jawa Tengah sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan penjelasan tersebut mencakup dua aspek utama terkait Disporapar di Jawa Tengah. Pertama, bagaimana pengelolaan beban administratif di instansi tersebut dapat ditingkatkan atau dioptimalkan? Kedua, kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi Disporapar di Jawa Tengah dalam menjalankan tugas administratifnya?

Dengan merinci pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dapat dilakukan analisis lebih lanjut untuk mencari solusi dan perbaikan yang diperlukan dalam konteks tata kelola negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (legal Research) merupakan penelitian yang bersifat tekstual, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum seperti peraturan hukum, putusan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori-teori hukum, dan pendapat para ilmuwan. Memperkuat kredibilitas dan ketelitian analisis terhadap fenomena yang ada dengan menggunakan pendekatan berbasis fakta dan analitis dan holistik.⁵ Subjek dalam penelitian ini adalah beban administrasi di DISPORAPAR Jawa Tengah. Sumber data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui pengamatan, dan literatur pustaka menggunakan teknik triangulasi teori, dan dianalisis menggunakan teknik kualitatif deduktif.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan beban administrasi di Disporapar Provinsi Jawa Tengah

Pada dasarnya, beban administrasi merupakan sebuah jenis beban yang terkait dengan aspek non produksi dan penjualan seperti biaya gaji karyawan, biaya telepon, pengeluaran yang dikeluarkan untuk listrik, air, gas dan juga elemen-elemen serupa, hal tersebut sering dikatakan sebagai beban umum atau beban administrasi. Definisi lain mengatakan, beban administratif adalah hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan publik, yang menimbulkan biaya besar yang mencakup biaya pembelajaran, kepatuhan, dan psikologis. Sebagian besar beban dapat dikategorikan berdasarkan salah satu dari tiga biaya: biaya pembelajaran, kepatuhan, dan psikologis. Dalam praktiknya, biaya-biaya tersebut mungkin berkorelasi dan tumpang tindih, namun biaya-biaya tersebut cukup berbeda untuk dipertimbangkan secara terpisah.⁷ Berbeda dengan beban langsung yang terkait erat dengan proses produksi atau penjualan barang, beban administrasi ini bersifat tidak langsung dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan volume penjualan atau produksi. Perusahaan atau instansi mengalokasikan sumber daya untuk beban ini guna mendukung kelancaran operasi sehari-hari dalam keberjalanan sebuah perusahaan atau instansi.

⁵ Isakh Benyamin Manubulu & Komang Pradnya (2018). Analisis Kontekstualitas Komunikasi Politik Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 Dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 1-20.

⁶ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, (2020). *Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.*

⁷ Pamela Herd, Hilary Hoynes, Jamila Michener & Donald Moynihan. (2023). Introduction: Administrative Burden as a Mechanism of Inequality in Policy Implementation. *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences*, 9(5), 1-30. <https://www.jstor.org/stable/48738492>



Beban administrasi sifatnya cenderung tetap yang mana berarti biaya ini tidak berfluktuasi sejalan dengan perubahan volume penjualan atau produksi. Meski biaya tersebut tidak langsung terjun berkontribusi pada pembuatan produk atau upaya penjualan, namun hal ini tetap penting adanya mengingat hal tersebut sebagai landasan operasional yang diperlukan bagi kelangsungan bisnis secara menyeluruh. Dengan demikian, maka pengeluaran inilah yang menjadi suatu bentuk investasi dalam mendukung efisiensi dan juga keberlanjutan aktivitas perusahaan dalam keseharian.⁸

Beban administrasi juga termasuk kedalam fungsi penunjang urusan pemerintah yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016,⁹ mengelola berbagai urusan dan fungsi penunjang, seperti kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, yang termasuk dalam Organisasi Perangkat Daerah, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata.¹⁰

Pembahasan mengenai beban administrasi mengenai beberapa hal, diantaranya tentang proses pengelolaan dokumen dan berkas administratif, sistem pelaporan administratif, dan juga pengelolaan anggaran dan sumber daya yang terkait dengan tugas administratif.

Menurut hasil wawancara di DISPORAPAR Jateng bersama bapak Supomo, SE. M.MPar, Kasi kemitraan dan kelembagaan pariwisata. Beliau menjelaskan tentang proses pengelolaan beban administrasi di DISPORAPAR Jateng. Beliau menyampaikan bahwa proses pengelolaan dokumen dan berkas administratif di DISPORAPAR, ketika adanya surat masuk dari luar maka akan diagendakan terlebih dahulu di subab umum yang menjadi sentral. Setelah itu akan diserahkan kepada kepala dinas dan ditelusuri tentang apa substansi surat tersebut. Kemudian pihaknya akan menyesuaikan kemana tujuan surat tersebut dibuat. Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, maka pihak yang bersangkutan akan memberikan balasan tentang kelanjutan dari surat tersebut. Dalam pengelolaan dokumen surat-surat tersebut, beliau mengatakan bahwa pengelolaan dengan cara pengagendaan dan juga pengarsipan baik dalam bentuk soft file maupun hard file, pengelolaan tersebut akan dibedakan berdasarkan surat masuk-surat keluar dan darimana surat itu masuk dan kemana surat itu keluar.

Selanjutnya, untuk sistem pelaporan yang ada di DISPORAPAR, beliau menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya laporan merupakan sebuah bentuk dari evaluasi. Misalnya dalam ini adalah dalam suatu event yang mana penanggung jawabnya adalah gubernur/pusat, namun bertempat di DISPORAPAR. Pada hal ini berkaitan dengan APBN dan APBD. Dalam event seperti ini tentu pengeluaran dari APBN dan instansi terkait hanya perlu mengelolanya dengan baik. Dengan ini tentu saja pusat harus melaporkan pengeluaran yang telat di anggarakan untuk event tersebut, begitupun bagian administrasi pada instansi daerah juga melaporkan perihal pengelolaan administrasi yang berjalan, baik berjalan sesuai yang diharapkan maupun terhalang oleh suatu kendala. Pelaporan hadir

⁸ Adinata. (2021, October 21). *Pengertian Akun Beban & Biaya Administrasi Umum Pada Bisnis UKM - Bisnis Dan Akuntansi*. Novalio.id. <https://novalio.id/blog/pengertian-akun-beban-biaya-administrasi-umum-pada-bisnis-ukm/>. Accessed November 25 2023.

⁹ Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016

¹⁰ Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2018 tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata*.



sebagai data yang bisa menjadi evaluasi maupun masukan untuk kelancaran keberlangsungan proses administrasi. Tentang pengelolaan anggaran dan sumber daya yang terkait dengan tugas administratif, Narasumber menjelaskan bahwasannya semua anggaran yang keluar akan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini seperti uang listrik perusahaan, air, gaji karyawan dan lain sebagainya. Sistematis dari pengeluaran dana diawali dengan perencanaan. Jadi, setiap anggaran yang keluar sudah jelas rencananya untuk tujuan apa.

Semua bentuk dari pengelolaan beban administrasi ini juga guna untuk kelancaran dan efektivitas keberjalanan instansi/perusahaan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah,¹¹ dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah¹² berperan sebagai entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memegang tanggung jawab untuk membuat susunan dan melaporkan akuntansi pelaksanaan APBD. Langkah ini mencakup penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.¹³

Hambatan yang dialami Disporapar Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan administrasi

Dalam keberlangsungan administrasi di layanan publik tentunya terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dialami. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah menghadapi beberapa kendala dalam operasionalnya. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Berdasarkan profil Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Provinsi Jawa Tengah mempunyai misi yang sangat kompleks, antara lain di bidang olahraga, pariwisata, dan kebudayaan.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa tugas pengelolaan Disporapar Jawa Tengah sangat beragam dan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten.

Selain itu, peraturan dan regulasi yang rumit membuat pengelolaan menjadi sulit. Disporapar di Jawa Tengah harus mematuhi berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata¹⁵ dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.¹⁶ Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi, serta rumitnya peraturan dan ketentuan, dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional manajemen.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Pariwisata Jawa Tengah perlu meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan pengembangan karyawan serta peningkatan infrastruktur teknologi informasi. Selain itu, diperlukan perbaikan agar proses pengelolaan menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai *Pemerintah Daerah*

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah*

¹³ PELAKSANAAN APBD. (n.d.). Disporapar Prov Jateng. <https://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/CALK%20DISPORAPAR%202020.pdf>. Accessed November 25 2023.

¹⁴ *DISPORAPAR JAWA TENGAH. VISI MISI.* <https://disporapar.jatengprov.go.id/content/visi-misi>. Accessed 25 November 2023.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Pariwisata*

¹⁶ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang *Kepemudaan*



begitu, Disporapar Jateng akan mampu mengoptimalkan kinerja administrasi serta mendukung pengembangan pariwisata, budaya, dan olahraga di Jateng.

Menurut hasil wawancara di Disporapar Jateng bersama bapak Supomo, SE. M.MPar, Kasi kemitraan dan kelembagaan pariwisata, terdapat berbagai kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Disporapar Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi: Keterbatasan tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Aturan dan regulasi yang rumit: lebih sulit dikelola dan membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia: Kendala administratif menjadi sulit diatasi.
4. Keterbatasan Teknologi Informasi : Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang diperlukan untuk pelayanan publik dapat terhambat.

Disporapar sendiri memiliki upaya dalam mengatasi kendala tersebut antara lain :

1. Pelatihan dan pengembangan pegawai: Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi manajemen.
2. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi: Peningkatan kemampuan teknologi informasi untuk mendukung proses administrasi dan pelayanan publik.
3. Peningkatan Proses Administrasi: Mengoptimalkan proses administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam proses pengelolaan dokumen dan berkas administratif yang ada di DISPORAPAR, ketika adanya surat masuk dari luar maka akan diagendakan terlebih dahulu di subab umum yang menjadi sentral. Setelah itu akan diserahkan kepada kepala dinas dan ditelusuri tentang apa substansi surat tersebut. Kemudian pihaknya akan menyesuaikan kemana tujuan surat tersebut dibuat. Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, maka pihak yang bersangkutan akan memberikan balasan tentang kelanjutan dari surat tersebut. Pengarsipan surat dilakukan dengan menyimpan pada soft file maupun hardfile. Untuk sistem pelaporan di DISPORAPAR sudah berjalan semestinya sebab dikatakan jika laporan merupakan sebuah bentuk dari evaluasi yang juga didalamnya banyak data dan informasi yang penting.

Hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di DISPORAPAR antara lain, Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi: Keterbatasan tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, aturan dan regulasi yang rumit: lebih sulit dikelola dan membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan, keterbatasan sumber daya manusia: Kendala administratif menjadi sulit diatasi, dan keterbatasan Teknologi Informasi. Untuk ini penanganannya antara lain, Pelatihan dan pengembangan pegawai: Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi manajemen, peningkatan infrastruktur teknologi informasi: Peningkatan kemampuan teknologi informasi untuk mendukung proses administrasi dan pelayanan publik, dan peningkatan Proses Administrasi: Mengoptimalkan proses administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Saran

Meninjau dari penjabaran pembahasan diatas mengenai hambatan yang dihadapi DIPORAPAR Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka perlu adanya



dorongan pelatihan dan pengembangan SDM yang ada untuk meningkatkan keahlian mereka dalam memahami teknologi informasi dan manajemen. Selain itu, perlu mengintegritaskan solusi teknologi informasi guna memudahkan proses administrasi dan pelaporan serta mengadvokasi kebutuhan regulasi yang jelas guna meminimalisir beban administrasi dan juga meningkatkan efisiensi berjalannya penyelenggaraan pelayanan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Dalam mengakhiri artikel ini, kami ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang telah berperan dalam pembuatan dan pengembangan konten. Terimakasih atas kontribusi, wawasan, dan kerja keras yang telah melibatkan berbagai perspektif. Semua kontribusi ini membantu membentuk kesimpulan dan memberikan kedalaman pada topik ini. Terima kasih atas dukungan dan dedikasi kepada Dosen kami Bapak Laga Sugiarto, M.H. selaku Dosen Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara. Dan kami juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Narasumber kami Bapak Supomo, SE. M.MPar, yang telah meluangkan waktu untuk kami wawancara guna menyelesaikan artikel ini, semoga artikel ini bermanfaat dan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap isu yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata. (2021, October 21). Pengertian Akun Beban & Biaya Administrasi Umum Pada Bisnis UKM - Bisnis Dan Akuntansi. Novalio.id. <https://novalio.id/blog/pengertian-akun-beban-biaya-administrasi-umum-pada-bisnis-ukm/>. Accessed November 25 2023.
- Adminpublik.(2020, September 18). Pengertian Administrasi Publik.Adminpublik.uma.ac.id <https://adminpublik.uma.ac.id/2020/09/18/pengertian-administrasi-publik/>. Accessed 25 November 2023.
- DISPORAPAR JAWA TENGAH. *VISI MISI*. <https://disporapar.jatengprov.go.id/content/visi-misi>. Accessed 25 November 2023.
- HERD, P., HOYNES, H., MICHENER, J., & MOYNIHAN, D. (2023). Introduction: Administrative Burden as a Mechanism of Inequality in Policy Implementation. *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences*, 9(5), 1–30. <https://www.jstor.org/stable/48738492>
- Manubulu, I. B., & Sudibya, K. P. (2018). Analisis Kontekstualitas Komunikasi Politik Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 Dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 1-20.
- Marzuki, A. (2020). Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 183-199. doi:<https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.192>.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram.
- PELAKSANAAN APBD. (n.d.). Disporapar Prov Jateng. <https://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/CALK%20DISPORAPAR%202020.pdf>. Accessed November 25 2023.
- Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2018 tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata*.



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah*

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016

Sellang, K. (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik: Antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Pariwisata*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai *Pemerintah Daerah*

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang *Kepemudaan*.